

# **PENGARUH PENGURANGAN IMPOR BERAS PAKISTAN TERHADAP PETANI BERAS INDONESIA**

**Oleh:**

**Alissha Fitri**

**(alissha.fitri0528@student.unri.ac.id)**

**Pembimbing : Faisyal Rani S.IP, MA**

**Bibliografi : 13 Jurnal, 13 Buku, 3 Skripsi, 5 Dokumen, 1 Surat Kabar, 15 Website.**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294  
Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*Along with the increasing rice consumption of Indonesian people, the national rice production also increase. The rice production in Indonesia increases but the government remains to import the rice in order to fulfill the domestic rice demand. The rice import development of Indonesia tends to be fluctuative every year. The biggest rice import that enters into Indonesia comes from Vietnam and Thailand. Both countries are the countries that have the biggest rice production total in Asia. Hence, the high price from the both countries, so Indonesia chooses to import Pakistan's rice where this country is the fourth rice production country with the low price.*

*The method of data collecting is done by collecting secunder data, then analyzed in qualitative to obtain the draft about the main problem by using deductive method. The method of this research is the method of qualitative descriptive. The data is obtained through secunder data such as, book, journal, magazine, newspaper and website.*

*From the research result, for fulfilling the own rice needs and making the local farmer prosperous so Indonesia increases the productivity and the increase of plantation index to be three times. This thing has goal to increase the national food security productivity by decreasing the rice import intencity.*

***Keywords: Pakistan's rice, import, Indonesia's rice farmer***

## I. Pendahuluan

Penelitian ini merupakan studi mengenai pengaruh pengurangan impor beras Pakistan terhadap petani beras Indonesia.

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani. Padi merupakan produk pertanian berupa tanaman asli negara-negara Asia termasuk juga Indonesia. Selain itu sebagian besar masyarakat Indonesia percaya, bahwa padi adalah anugerah dari Yang Maha Pencipta sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>1</sup>

Kebutuhan yang dikonsumsi per tahun mencapai 33,5 juta ton dan terus meningkat. Produksi pertanian padi di Indonesia selalu mengalami pasang surut. Pada pemerintah Orde Baru, stabilitas ekonomi makro, khususnya inflasi menjadi inti pembangunan ekonomi. Harga beras berperan besar dalam penentuan tingkat inflasi, sehingga harga beras dikendalikan untuk tujuan menstabilkan harga umum. Pemerintah memberikan hak monopoli impor beras kepada Badan Urusan Logistik (BULOG), guna menstabilkan harga beras dalam negeri.

Pakistan merupakan salah satu negara pengekspor beras terbesar di dunia, sementara Indonesia merupakan negara pengimpor beras. Berdasarkan data, harga produksi rata-rata gabah atau beras Pakistan sekitar 6.500 ton (\$ 2,19 Juta).<sup>2</sup>

Indonesia dan Pakistan juga melakukan kerjasama untuk saling bantu dan mendukung kebutuhan negara masing-masing. Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menetapkan Pakistan sebagai pemasok baru beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Diversifikasi asal beras impor dilakukan untuk menghindari

ketergantungan Indonesia akan beras Thailand dan Vietnam. Pakistan masuk dalam daftar negara pemasok beras Indonesia, diharapkan perusahaan beras asal Thailand dan Vietnam mau memberikan harga terbaik kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog yang ditugaskan pemerintah menjaga stok beras nasional.

Masalah impor beras di negara Indonesia saat ini menjadi dilematis karena dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Barangkali masalah impor beras tidak akan menjadi polemik yang berkepanjangan jika pemerintah dapat memberikan penjelasan secara jelas dan transparan mengenai alasan-alasan mengapa harus dilakukan impor beras. Tentunya juga diharapkan agar masyarakat luas mau mengerti dan memahami (bahkan membantu mencari solusi pemecahannya, melalui ide dan pemikiran-pemikiran) apabila alasan yang diberikan oleh pemerintah memang benar menyangkut kepentingan masyarakat umum khususnya dalam rangka menjaga stabilitas pangan nasional.<sup>3</sup>

Dalam Inpres No. 9 Tahun 2002 tertuang bahwa kebijakan tarif impor ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor beras dengan mengatur penetapan tarif impor, sehingga dapat melindungi petani sekaligus melindungi konsumen dalam negeri. Maka dari itu jika kebutuhan akan beras digantungkan penuh dari impor maka akan mengganggu kemandirian pangan suatu negara dan ketergantungan secara terus menerus kepada Pakistan sebagai negara pengekspor beras ke Indonesia akan merugikan posisi ekonomi Indonesia. Sehingga perlu adanya suatu kebijakan tarif impor beras untuk mengurangi dampak negatif adanya impor beras. Maka berdasarkan uraian di atas maka penulis

<sup>1</sup> BALIPTA (Balai Penelitian Padi), *Inovasi teknologi untuk Peningkatan Produksi Padi dan Kesejahteraan Petani*, Sukamandi: Badan Litbang Pertanian, hal. 157

<sup>2</sup> <https://finance.detik.com/.../ini-alasan-ri-ingin-impor-beras-dari-india-dan-pakistan>, diakses 25 November 2017, pkl. 18.35WIB

<sup>3</sup> Ramlan. 2002. *Mempersoalkan Beras Impor*. Warta Intra Bulog, Jakarta.

tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana pengaruh pengurangan impor beras Pakistan terhadap petani beras Indonesia.

### **Kerangka Teori**

Penelitian ini dibangun atas tiga pondasi utama yakni, Perspektif Liberalisasi perdagangan dengan tingkat dan unit analisis yang digunakan adalah negara-bangsa (*Nation-State*) dan menggunakan teori perdagangan internasional. Secara teoritik, tiga pondasi utama ini yang nantinya akan menjawab bagaimana pengaruh pengurangan impor beras Pakistan terhadap petani beras Indonesia.

Perspektif Liberalisasi perdagangan cenderung menciptakan pusat-pusat produksi baru yang menjadi lokasi berbagai kegiatan industri yang saling terkait dan saling menunjang sehingga biaya produksi dapat diturunkan. Kedua, iklim usaha menjadi lebih kompetitif sehingga mengurangi kegiatan yang bersifat rent seeking dan mendorong pengusaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, bukan bagaimana mengharapkan mendapat fasilitas dari pemerintah. Ketiga, arus perdagangan dan investasi yang lebih bebas mempermudah proses alih teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Keempat, perdagangan yang lebih bebas memberikan signal harga yang “benar” sehingga meningkatkan efisiensi investasi. Kelima, dalam perdagangan yang lebih bebas kesejahteraan konsumen meningkat karena terbuka pilihan-pilihan baru. Namun untuk dapat berjalan dengan lancar, suatu pasar yang kompetitif perlu dukungan perundang-undangan yang mengatur persaingan yang sehat dan melarang praktek monopoli.<sup>4</sup>

Penulis menggunakan tingkat dan unit analisis negara-bangsa (*Nation-State*). Pada tingkat analisa ini, negara merupakan aktor yang paling berperan dalam sistem

internasioanl dan relatif memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil<sup>5</sup>. Penggunaan tingkat analisis ini lebih berkonsentrasi pada apa yang dilakukan oleh negara serta bagaimana negara memutuskan untuk mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan nasional (*national interest*). Selain itu tingkat analisa ini mempercayai bahwa negara adalah aktor dominan yang kuat dalam peraturan interaksi dunia.

Penulis menggunakan teori perdagangan internasional. Dalam studi Ekonomi Politik, posisi kebijakan perdagangan adalah sangat sentral. Kebijakan perdagangan merupakan salah satu analisis substansial pokok yang juga melandasi lahirnya konsep dan teori dalam Ekonomi Politik. Kebijakan perdagangan menurut M.L. Jhingan,<sup>6</sup> sebagai suatu kebijakan yang dapat menopang percepatan laju pembangunan ekonomi dengan cara: a. Memungkinkan negara terbelakang memperoleh bagian lebih besar dari manfaat perdagangan; b. Meningkatkan laju pembentukan modal; c. Meningkatkan industrialisasi; d. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran.

Faktor redistribusi Pada negara-negara dunia ketiga, biasanya terjadi kesenjangan harga dan biaya pertanian dan industri begitu lebar. Hal ini menghambat perkembangan industri yang dianggap lebih produktif. Di negara-negara Dunia Ketiga yang umumnya terbelakang, dengan penduduk yang padat, upah pekerja yang murah bagi pertanian, dan sebaliknya lebih besar upah pekerja industri yang lebih tinggi. Kalau sistem pemberian upah industri lebih kecil daripada industri agraris atau pada lapangan pertanian itu sendiri, maka para pekerja tidak menyediakan diri untuk bekerja di sektor-sektor perindustrian.

<sup>4</sup> *Liberalisasi Perdagangan*. Gatoet S. Hardono. Pusat Pengembangan dan Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, hal. 80

<sup>5</sup>Ibid, hlm 42

<sup>6</sup> M. L. Jhingan. 1990. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Terjemahan. Jakarta. Rajawali Press (1983). Hal. 579

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-analitik dimana dalam penelitian kualitatif mempunyai konsep dasar penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>7</sup> Metode dengan memperhatikan perilaku aktor-aktor internasional dengan menghubungkan sebab akibat yang terjadi dengan menggunakan teknik kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deduktif dengan sifat deskriptif analitikal dan pengumpulan data dari berbagai literatur berupa buku, koran, majalah, jurnal dan internet yang sesuai dengan permasalahan yang ingin dikemukakan penulis.

Data-data dalam suatu penelitian mempunyai peranan penting dalam mencari jawaban serta membuktikan hipotesa dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui teknik *library research*, penulis memanfaatkan buku-buku, jurnal, artikel-artikel dan berita-berita yang berasal dari berbagai media.

Penulis memberikan batasan penelitian ini pada kasus impor beras pakistan dalam rentang waktu tahun 2011 sampai tahun 2016.

## II. ISI

Campur tangan pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak Maret 1933 yaitu di zaman pemerintahan Belanda. Saat itu, untuk pertama kalinya pemerintah belanda mengatur kebijakan perberasan, yaitu dengan cara menghapus impor beras secara bebas serta membatasi impor secara lisensi. Beras mempunyai sejarah yang sangat panjang dalam percaturan ekonomi politik Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaannya sebagai makanan pokok

bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Untuk hal itulah campur tangan dari pemerintah untuk menjamin keberadaan beras dengan harga yang terjangkau selalu dilakukan, termasuk oleh pemerintahan kolonial Belanda saat itu.<sup>8</sup>

Pemerintah kolonial Belanda mengintervensi kecukupan pasokan beras dengan harga terjangkau terhadap komoditi ini melalui berbagai cara, termasuk dengan pembangunan infrastruktur dan investasi teknologi pertanian dalam hal ini produksi. Sementara dalam sisi stabilitas harga, pemerintah kolonial juga dari waktu ke waktu membuka keran impor bila dibutuhkan dan mentransportasinya dari pulau ke pulau atau daerah yang membutuhkan, serta mendirikan suatu lembaga pangan.<sup>9</sup> Tanggal 25 April 1939, lahirlah suatu lembaga pangan yang disebut Voeding Middelens Fonds (VMF). Lembaga ini berperan dalam menstabilkan harga beras, yang merupakan cikal bakal dari Bulog.

Setelah kemerdekaan, beras terus menjadi komoditas sosial politik strategis bangsa Indonesia. Namun pada masa era demokrasi terpimpin, dengan dijadikannya politik sebagai panglima, terdapat semacam pengabaian keberadaan keterjangkauan komoditi beras. Akibatnya, ketiadaan komoditi ini pada daerah beberapa perkotaan Indonesia menjadi salah satu alasan jatuhnya rezim Soekarno pada tahun 1965.

Untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat, pada awal pemerintahan rezim Orde Baru, membuka keran impor dan bantuan luar negeri untuk impor beras. Setelah kepercayaan ini diraih, dan stabilitas teraih, Orde Baru merevitalisasi peran Bulog untuk menopang harga beras agar terjangkau, dengan tugas dan struktur

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 2. lihat pada Sumarlan, 2016, *Upaya Jaringan NGO International Pops Elimination Network (IPEN) Mengatasi Masalah Penggunaan Merkuri Di Indonesia*, Skripsi Strata-1, Universitas Riau: Pekanbaru.

<sup>8</sup> “*Sejarah Bulog, Sebelum Menjadi Perum*”, dalam [http://bulog.co.id/old\\_website/sejarah.php](http://bulog.co.id/old_website/sejarah.php) ., diakses 30 November 2017, pkl. 16.14 WIB

<sup>9</sup> Ibid

organisasi yang diperluas. Intervensi pemerintah dibidang pertanian termasuk perberasan diperluas cakupannya ke sisi produksi dan kesejahteraan petani. Sepanjang tahun 1970 sampai dengan 1980-an, investasi besar-besaran pada infrastruktur pertanian, pengembangan benih unggul, pestisida dan subsidi pada pupuk petani.

Pembangunan infrastruktur pertanian dan pengembangan teknik-teknik pertanian, serta subsidi pada petani ini kemudian dikenal sebagai the green revolution, revolusi hijau dibidang pertanian. Dari revolusi hijau ini dihasilkan peningkatan produksi beras secara besar-besaran, dimana produksi dalam negeri praktis berhasil memenuhi permintaan.

Pada puncaknya pada tahun 1984 Indonesia berhasil surplus dari produksi beras, atau yang dikenal dengan swasembada pangan. Disaat yang sama revolusi hijau pun menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat di pedesaan dan memperkecil ketimpangan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota, walaupun pada saat itu ada penurunan tingkat produksi pertanian. Impor yang dilakukan oleh Indonesia itu dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin ketersediaan stok pangan nasional, agar tidak terjadi krisis pangan di Indonesia yang bisa mengakibatkan mengganggu kestabilan nasional. Impor beras pun dilakukan sampai saat ini salah satu impor yang dilakukan oleh pemerintah yaitu berasal dari Pakistan dimana impor yang dilakukan oleh Indonesia dari Pakistan telah terjalin dalam suatu nota kesepatakan *MoU* yang telah disetujui oleh kedua belah pihak Negara baik itu Indonesia maupun Pakistan. Dimana Pakistan bersedia untuk mensuplai sampai 1 juta ton beras ke Indonesia apabila dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia.

Besarnya konsumsi beras di Indonesia disebabkan juga oleh tingginya jumlah penduduk Indonesia, dimana peningkatan penduduk di Indonesia menyebabkan konsumsi beras di Indonesia

terus meningkat. Tingginya konsumsi beras di Indonesia menyebabkan impor beras tidak bisa dihentikan sehingga sampai saat ini Indonesia masih mengimpor beras dari negara luar. Dampak negatif dari hal ini adalah beras merupakan barang *thin market* sehingga ketika ketersediaan beras dunia menipis maka akan mengganggu ketahanan pangan Indonesia.

Swasembada beras merupakan salah satu program yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dimana selama lima tahun kedepan Kementerian Pertanian tetap menempatkan padi, jagung, dan kedelai sebagai komoditas utama. Sehubungan dengan itu, target Kementerian Pertanian selama lima tahun tersebut adalah pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Target pemerintah untuk swasembada berkelanjutan untuk beras akan mampu dicapai pada tahun 2017 sebesar 79.370.274 Ton untuk produksi padi. Tahun 1984 Indonesia mampu mencapai swasembada beras. Menurut Hafshah dan Sudaryanto, keberhasilan swasembada beras pada tahun 1984 disebabkan oleh dukungan politik pemerintah yang memprioritaskan pembangunan pertanian disertai kebijakan ekonomi makro yang mendukung, terobosan teknologi baru (Revolusi Hijau) budidaya padi sawah dan kebijakan intensifikasi pertanian (Bimas) yang mengatur penerapan paket teknologi secara sentralistik. Kurangnya dukungan politik pada pembangunan pertanian menyebabkan swasembada beras ini gagal dipertahankan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan agar dapat meramalkan pencapaian target swasembada berkelanjutan untuk beras pada tahun 2017 yang akhirnya dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan produksi padi domestik sehingga dapat memberikan alternatif strategi kebijakan guna mendukung

tercapainya swasembada beras pada tahun 2017.<sup>10</sup>

Impor beras dilakukan untuk memperkuat cadangan beras nasional, cadangan beras yang cukup diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas pangan. Memperkuat cadangan beras nasional melalui impor dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya mengindikasikan bahwa Indonesia sudah tidak lagi berswasembada beras.

Ketahanan pangan diwujudkan melalui impor beras menghasilkan suatu kebijakan yang rentan, yang selalu mengakibatkan pro dan kontra. Disatu sisi apabila pemerintah tidak mengimpor beras, Indonesia akan kekurangan cadangan beras nasional yang mengakibatkan dapat memicu timbulnya krisis pangan yang dampaknya dapat mengguncang stabilitas politik atau ekonomi Indonesia. Tetapi disisi lain, impor yang dilakukan oleh pemerintah tersebut berdampak terhadap para petani Indonesia. Rencana pemerintah untuk mengimpor beras dari Pakistan sebesar 500.000 ton terjadi setelah adanya keterlambatan pemerintah memutuskan impor beras dari Pakistan dan Thailand.

Pemerintah berencana untuk mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton dari kedua negara itu. Namun karena terlambat memutuskan, maka stok beras yang ada di negara eksportir sudah menipis dikarenakan Filipina telah melakukan pembelian dalam jumlah yang cukup besar dan menyebabkan harga beras mengalami kenaikan.<sup>11</sup>

### **Permasalahan Impor Beras**

Ancaman terhadap pangan	terhadap ketahanan disebabkan	ketahanan terjadinya
-------------------------	-------------------------------	----------------------

<sup>10</sup> Skripsi ANALISIS PENCAPAIAN PROGRAM SWASEMBADA BERAS PADA TAHUN 2017 DI INDONESIA. Rahayu. 2016. Institut Pertanian Bogor. hal. 3-4

<sup>11</sup><http://nasional.kompas.com/read/2015/11/18/20543911/Tahun.2016.Indonesia.Buka.Peluang.Impor.Beras.dari.Pakistan>, diakses 1 Desember 2017, pkl. 18.23 WIB

ketidakseimbangan antara jumlah produksi dan konsumsi pangan. Jumlah konsumsi beras di Indonesia tampaknya akan sulit ditekan karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengandalkan beras sebagai makanan pokok. Bila konsumsi tidak dapat ditekan sementara jumlah produksi beras di tingkat nasional yang menurun, maka situasi demikian akan memperburuk ketahanan pangan nasional. Namun sesungguhnya, berkurangnya jumlah produksi beras tidak otomatis menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan selama mampu mengimpor beras dari luar negeri.

Namun permasalahannya, dalam situasi perekonomian yang tidak menentu seperti sekarang ini, mengimpor beras bukanlah persoalan yang gampang. Selain dampak psikologis karena Indonesia pernah dikenal dunia internasional sebagai negara yang pernah berswasembada beras, juga disebabkan oleh masalah devisa. Mengimpor beras dari luar negeri, pemerintah harus memiliki cadangan devisa yang besar. Cadangan devisa akhirnya menjadi faktor yang menentukan karena untuk mendatangkan beras impor tidak dapat menggunakan rupiah. Merosotnya nilai rupiah jelas akan memperburuk posisi daya beli Indonesia terhadap komoditas yang diimpor. Aksesibilitas terhadap pasar internasional yang terus berkurang pada gilirannya akan mengancam ketahanan pangan di tingkat nasional. Menipisnya cadangan devisa, stagnannya produksi beras serta masalah aksesibilitas terhadap pasar merupakan sebagian dari banyak persoalan yang berpotensi besar terhadap ancaman ketahanan pangan di tingkat nasional.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Permendag Nomor 54/M-DAG/per/10/2009

<sup>12</sup> Safuan, Sugiharso. 1997. *Ketahanan Pangan dan Gejolak Moneter Dalam Penduduk, Pangan dan Ancaman Hantu Malthus*. Warta Demografi No. 3/1997. Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. hal. 36-38

Menurut Amang dan Sawit,<sup>13</sup> kebijaksanaan impor beras yang berlebihan mengandung sejumlah resiko dalam mempertahankan kemandirian dan kekuatan suatu negara. Pangan dapat dijadikan alat politik untuk menekan suatu negara oleh negara besar atau oleh negara pesaing, misalnya melalui embargo pangan. Apalagi upaya pemenuhan beras yang berasal dari impor bukanlah pekerjaan gampang. Hal ini karena volume beras yang diperdagangkan di pasar dunia relatif kecil yaitu sebesar 15 juta ton atau sebesar 4-5 persen dari total produksi dunia sekitar 350 juta ton. Dari 15 juta ton beras tersebut sebagian besar sudah memiliki pembeli (negara-negara di Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah dan Asia), sehingga bila Indonesia masuk ke pasar beras dengan satu sampai dua juta ton akan mengakibatkan guncangan harga beras di pasar dunia. Selanjutnya dikemukakan bahwa angka impor yang aman Indonesia diperkirakan jangan lebih dari lima persen dari jumlah beras yang diperdagangkan di pasar dunia.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut maka Indonesia harus segera memacu produksi beras dalam negeri yang lebih serius di masa datang. Setiap Indonesia mengimpor beras sebesar satu juta ton dari Pakistan, maka diperkirakan harga beras dunia akan melonjak minimal US\$ 50,00 per ton.<sup>14</sup>

### **Langkah Strategis Peningkatan Komoditi Pangan Indonesia**

Indonesia memiliki permasalahan perberasan yang kompleks. Melalui identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi stok beras nasional dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam perberasan di Indonesia adalah lemahnya produksi dan jumlah permintaan beras dalam negeri. Perkembangan

produksi beras di Indonesia terus mengalami peningkatan tetapi belum mampu memenuhi permintaan beras dalam negeri walaupun secara statistik tingkat konsumsi mulai menurun.

Oleh karena itu hingga saat ini Indonesia bergantung pada impor beras. Semenjak tidak ada tarif impor beras, jumlah beras yang masuk ke Indonesia juga semakin banyak. Sedangkan harga beras impor jauh lebih murah dibandingkan dengan harga beras dalam negeri. Semua hal tersebut menjadi kendala cadangan beras dimana kita harus bergantung pada impor, konsumsi perkapita yang meningkat dan harga yang meningkat. Untuk menghadapi kendala-kendala yang terdapat dalam mekanisme stok beras nasional, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Peningkatan produksi beras dalam negeri

Melalui pembaharuan kebijakan produksi yang berlaku saat ini atau yang juga dikenal dengan Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) yang dimulai sejak awal tahun 2007. Target dari program ini adalah peningkatan produksi 2 juta ton beras atau tumbuh sekitar 5 % untuk pemenuhan pengadaan beras dalam negeri. Dengan adanya program ini dapat dilakukan pembenahan di bidang *on farm*. Pembenahan di bidang *on farm* dapat dilakukan dengan pembenahan produksi beras dalam negeri melalui sentra produksi beras yang ada di Indonesia.

Jika produksi beras meningkat maka dapat menutupi kekurangan permintaan beras dalam negeri yang selama ini tidak tercukupi. Pengembangan R&D dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada para petani bagaimana dalam meningkatkan produksi dan produktivitas padi. Pemberian informasi yang lebih

<sup>13</sup> Amang, Beddu dan M.H. Sawit. 2001. *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional*. Pelajaran Dari Orde Baru dan Orde Reformasi. Penerbit IPB Press, Bogor. Edisi Kedua.

<sup>14</sup> Suryana A. 2008. *Menelisik Ketahanan Pangan, Kebijakan Pangan, dan Swasembada Beras*. Jurnal Agro Ekonomi. JAE Vol. 1(1). Bogor : Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, hal. 10

terbaru kepada para petani padi baik mengenai harga atau teknologi baru. Dalam menunjang keberhasilan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas beras nasional, pemerintah perlu melakukan pemberian subsidi bagi yang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh para petani.

Pemberian subsidi dapat dilakukan seperti subsidi langsung berdasarkan nilai jenis usaha tani dan lahan pertanian serta adanya subsidi tetap yang sudah dianggarkan pemerintah. Pemberian subsidi seperti ini cukup berhasil diterapkan pada petani Jepang. Jika pemerintah Indonesia mencoba untuk menerapkannya, tingkat kesejahteraan petani akan meningkat dan produksi beras akan meningkat pula. Suksesnya produksi beras Pakistan tidak terlepas dari teknologi panen dan pasca panen yang dilakukan oleh petani Pakistan. Hal ini dapat diterapkan oleh petani padi yang ada di Indonesia karena kondisi geografi antara Indonesia dan Pakistan yang sama.

Dalam melakukan penyimpanan selama penggilingan sebaiknya dilakukan 1-3 bulan. Hal ini dilakukan untuk menghindari rusaknya beras serta dapat menjaga kualitas dari beras tersebut. Secara ekstensifikasi produksi dapat dilakukan dengan mengurangi konversi lahan pertanian ke lahan industri. Karena hal ini akan mengurangi luas penanaman padi di Indonesia. Kasus yang sama juga terjadi di Jepang dan Singapura dimana jumlah luas areal tanaman padi mulai berkurang tetapi mereka tidak merasa kehilangan *supply* beras. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan diversifikasi pangan ini mungkin dapat diterapkan di Indonesia.

Untuk tetap dapat menjaga *supply* beras yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia dapat melakukan penganeekaragaman pangan untuk mengkonsumsi gandum, jagung, sayur-sayuran ataupun kedelai. Makanan tersebut

menjadi makanan alternatif jika kebutuhan beras tidak dapat mencukupi pada satu waktu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Lubis,<sup>15</sup> bahwa diversifikasi pangan melalui *domestic support* yaitu dimana mengkonsumsi pangan selain beras dan hal ini juga akan membatasi jumlah impor beras yang masuk ke Indonesia serta menjaga kestabilan jumlah *supply* beras yang ada di Indonesia.

## 2. Merevitalisasi peran BULOG

Pada tataniaga beras dan gabah, maka dibutuhkan revitalisasi BULOG sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk meregulasi dan mengontrol perdagangan dan pengadaan beras dan gabah. Hal yang harus dilakukan oleh BULOG adalah Mengawasi saluran tataniaga beras dari petani padi hingga konsumen akhir. Melakukan penyerapan hasil produksi beras yang ada pada petani sebagai pengadaan beras dalam negeri, mengatur dan mendata kapasitas *rice mill*, sebagai regulasi dan fasilitator perdagangan beras serta juga sebagai *price control*.

Dari sisi tataniaga beras perlu dilakukan revitalisasi peran BULOG agar dapat menjadi Perum yang setara dengan VinaFood. BULOG harus mampu melakukan dan menangani pengadaan, penyimpanan (stok), pengolahan dan perdagangan beras daerah kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. BULOG harus memiliki kewenangan melaksanakan pengadaan dan distribusi beras di daerah, nasional dan internasional tanpa campur tangan pihak luar selama kesetimbangan pasar beras tercapai dan tujuan yang ditetapkan pemerintah pada BULOG untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, distribusi dan perdagangan dapat dilakukan dengan baik.

Revitalisasi peran BULOG dapat juga dengan cara mengadaptasi sistem manajemen stok yang ada di Pakistan atau

<sup>15</sup> Lubis, A. 2005. *Analisis Kebijakan Impor Beras dan Kaitannya dengan Diversifikasi Pangan Pokok*. Tesis. Bogor. Sekolah Pasca Sarjana IPB, hal. 37

Jepang. BULOG dapat membangun kerjasama yang solid dengan petani sehingga petani di Indonesia lebih merasa diperhatikan seperti yang dilakukan oleh Vinafood dengan para petani padi yang ada di Pakistan. Namun hal ini tidak lepas dari pengawasan pemerintah mulai dari tingkat kabupaten yang patuh dan komitmen terhadap kebijakan beras yang ada di Indonesia. Kerjasama BULOG tidak hanya dengan petani saja tetapi juga dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang perberasan yang memiliki peran dalam memudahkan penyaluran beras dari petani hingga konsumen akhir.

Untuk dapat meminimalkan biaya tataniaga beras yang ada di Indonesia, pemerintah dapat melakukan pemotongan saluran tataniaga, seperti sistem yang ada pada tataniaga beras di Jepang. Produksi yang ada di petani langsung di salurkan ke BULOG, dari tangan BULOG akan menyalurkan ke pedagang pengecer dan pedagang pengecer menjual ke konsumen akhir. Mempersingkat saluran tataniaga beras sendiri akan meningkatkan peran BULOG sebagai distributor utama dalam menyalurkan beras hingga ke tangan konsumen dan hal ini akan jauh lebih efisien.

Revitalisasi dari segi stabilisasi harga oleh BULOG dapat dilakukan melalui *price control*. Control terhadap perdagangan bebas dapat dilakukan melalui penetapan harga dasar (*floor price*) yang akan berpengaruh terhadap keuntungan petani dan juga kesejahteraan petani. Selanjutnya juga penetapan harga maksimum (*ceilling price*) yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Menurut Firdaus, Baga, Pratiwi<sup>16</sup> perlindungan terhadap konsumen beras dapat dilakukan melalui kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga agar komoditas pangan

pokok masih dalam jangkauan daya beli konsumen, terlebih golongan ekonomi bawah.

Idealnya, harga beras di tingkat konsumen harus mampu diakses oleh seluruh golongan masyarakat dengan harga yang sesuai untuk setiap jenis dan kualitas beras. Selain itu, harga di pasar seharusnya memberikan keuntungan bagi petani produsen maupun konsumen. Jika terjadi kerawanan pangan, BULOG sebagai stabilisator harga beras akan melakukan OPM (Operasi Pasar Murah) di wilayah yang mengalami kelangkaan dan kerawanan pangan.

Beras yang dijual melalui OPM harganya biasanya lebih rendah sekitar 10-15 persen dibanding harga pasar. Dalam Kusumaningrum<sup>17</sup> bahwa kebijakan HDPP lebih efektif jika dibandingkan dengan harga dasar gabah jika dilihat dari sisi peningkatan produksi karena persentase peningkatan produksi periode HDPP sebesar 15% lebih tinggi dari rata-rata kebijakan yang telah diterapkan dan akan meningkatkan produksi padi.

Namun kebijakan ini harus didukung oleh kebijakan perberasan lainnya untuk terus dapat dijalankan sehingga akan mempertahankan kesejahteraan rakyat. Artinya perlu pembaharuan kembali mengenai kebijakan HDPP dalam pengontrolan harga beras oleh BULOG dan pemerintah.

### **Upaya Peningkatan Komoditi Tanaman Pangan Pasca Pengurangan Impor Beras Pakistan**

Untuk mengurangi dampak ketergantungan akan bahan pangan impor beras Pakistan dan menciptakan ketahanan pangan, diperlukan beberapa usaha di antaranya yaitu:

<sup>16</sup> Suryana A. 2008. *Menelisk Ketahanan Pangan, Kebijakan Pangan, dan Swasembada Beras*. Jurnal Agro Ekonomi. JAE Vol. 1(1). Bogor : Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, hal 37

<sup>17</sup>Kusumaningrum R, 2008. *Dampak Kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah Terhadap Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia*. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana. Bogor. IPB, hal. 38

1. Mematok harga dasar pangan yang menguntungkan petani dan konsumen. Harga tidak boleh tergantung kepada harga internasional karena tidak berkorelasi langsung dengan ongkos produksi dan keuntungan. Harga harus sesuai dengan ongkos produksi dan keuntungan petani dan kemampuan konsumen.
2. Memberikan insentif harga kepada petani komoditas pangan (terutama beras, kedelai, jagung, singkong, gula dan minyak goreng) jika terjadi fluktuasi harga. Hal ini sebagai jaminan untuk tetap menggairahkan produksi pangan dalam negeri.
3. Mengatur kembali tata niaga pangan. Pangan harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bulog bisa diberikan peran ini, tapi harus dengan intervensi yang kuat dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.
4. Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan benih varietas unggul yang tahan terhadap anomali iklim dan berumur sedang. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga penelitian, studi perguruan tinggi, maupun kerjasama bilateral.
5. Menambah produksi pangan secara terproyeksi dan berkesinambungan, dengan segera meredistribusikan tanah objek *landreform* yang bisa segera dipakai untuk pertanian pangan.
6. Menyediakan insentif bagi petani komoditas pangan, terutama bibit, pupuk, teknologi dan kepastian beli.
7. Memperlancar arus distribusi hasil pertanian dengan siklus yang pendek, sehingga dapat tersalurkan ke seluruh penjuru Nusantara dengan harga yang terjangkau sampai ke tangan rakyat.
8. Memberikan dukungan pelebagaan organisasi petani komoditas pangan, yakni kelompok tani, koperasi, dan ormas tani.
9. Menciptakan diversifikasi pangan yang memiliki nilai gizi yang setara dengan beras dan ekonomis terjangkau oleh rakyat. Sehingga rakyat tidak selalu bergantung pada ketersediaan beras. Hal ini dapat dijalankan bersamaan dengan menggali potensi tanaman tradisional (lokal) yang sudah terbiasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat.
10. Untuk menunjang budidaya tanaman pangan yang lebih cermat dan akurat perlu didukung dengan ketersediaan data iklim khususnya curah hujan yang secara kontinyu dapat di-update secara otomatis dari stasiun-stasiun iklim yang telah dipasang. Selain itu, Balitklimat telah dan sedang menyusun kalender tanam yang diharapkan dapat membantu Dinas Pertanian, petani dan pelaku agribisnis serta pengguna lainnya dalam budidaya dan pengembangan tanaman pangan khususnya dan tanaman-tanaman semusim lainnya.<sup>18</sup>

Selain upaya-upaya tersebut, beberapa hal di bawah ini juga diperlukan yaitu:<sup>19</sup> pertama, dengan membeli gabah/beras petani akan menutup peluang impor. Itu penting karena impor sama saja mensubsidi petani negara lain. Kedua, ketika cadangan beras pemerintah aman (1,5 juta ton), pasar terisolasi dari gejolak/spekulasi, pemerintah memiliki cadangan yang lebih dari cukup untuk

<sup>18</sup>[https://www.kompasiana.com/ferrynang/indonesia-negara-penghasil-pangan-yang-masih-impor-bahan-pangan\\_550a1d6e8133117f1cb1e72d](https://www.kompasiana.com/ferrynang/indonesia-negara-penghasil-pangan-yang-masih-impor-bahan-pangan_550a1d6e8133117f1cb1e72d), diakses 5 Desember 2017, pkl. 21.03 WIB

<sup>19</sup><http://news.metrotvnews.com/read/2015/05/19/397493/jurus-pamungkas-agar-tidak-impor-beras>, diakses 5 Desember 2017, pkl. 21.20 WIB

intervensi harga melalui operasi pasar. Ketiga, ketika stabilitas harga terjaga, potensi ledakan inflasi akibat instabilitas harga beras tereduksi. Keempat, stabilisasi harga beras tak hanya menguntungkan produsen dan konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi di sektor beras/padi dan sektor lain yang terkait. Bahkan, stabilisasi akan menjungkit pasar tenaga kerja dan meredakan keresahan sosial.

Jika berbagai kebijakan dapat berjalan dengan baik, mampu memprioritaskan penggunaan produk pangan dalam negeri, memberikan insentif bagi petani maka harapan dan optimisme keberhasilan pembangunan pertanian serta terciptanya ketahanan pangan nasional akan semakin nyata.

### **Reformasi Kebijakan Beras Impor**

Tiga perubahan kebijakan dapat membuat harga beras lebih terjangkau bagi warga miskin. Pertama, pemerintah sebaiknya menghapuskan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Kebijakan ini belum berhasil menurunkan harga beras, yang melonjak ke rata-rata Rp 10.646,56 per kilogram, atau 12,07% di atas HET antara September 2016 hingga Mei 2017. Harga beras di Indonesia mencapai sekitar dua kali lipat lebih mahal dibandingkan harga internasional pada Mei 2017. Selain itu, kebijakan HET secara tidak adil menempatkan tanggung jawab untuk menurunkan harga beras pada para pedagang eceran, padahal laba terbesarnya justru dinikmati oleh para tengkulak, pemilik penggilingan padi, dan pedagang grosir.

Kedua, pemerintah sebaiknya menghapus Pasal 9 ayat 1.b pada

Permendag Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras yang memberikan Badan Urusan Logistik (Bulog) hak untuk memonopoli importasi beras. Terkait dengan ini, pemerintah seyogyanya memfokuskan diri sebagai regulator guna memastikan keadilan dan transparansi dalam proses impor tersebut. Bulog tidak dapat menentukan waktu impor berdasarkan kebutuhan dan kondisi pasar dikarenakan badan tersebut harus mempertimbangkan proses birokrasi dan pertimbangan politis pemerintah. Akibatnya, Bulog menghabiskan lebih banyak dana untuk impor beras daripada yang seharusnya, sehingga memboroskan anggaran hingga Rp 303 milyar (22,78 juta dolar Amerika Serikat [AS]) antara tahun 2010 hingga 2017. Oleh karena itu, importasi dan distribusi beras sebaiknya dibuka sebagai peluang usaha bagi perusahaan-perusahaan swasta yang memenuhi syarat. Hal ini penting mengingat rantai distribusi beras impor lebih pendek dibandingkan beras lokal, sehingga beras impor dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan para konsumen.

Ketiga, Bulog sebaiknya memusatkan perhatian pada tugasnya dalam penanggulangan bencana, terutama dalam menyiapkan, mengelola, dan mendistribusikan beras ke daerah-daerah yang terdampak oleh bencana maupun situasi darurat lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.234 situasi bencana sepanjang paruh pertama tahun 2017, termasuk banjir, tanah longsor, puting beliung, dan gempa bumi. Sejumlah bencana alam diperkirakan akan terus melanda Indonesia, sehingga upaya penanggulangan bencana selayaknya menjadi prioritas penting.

### **III. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya mengenai

pengaruh pengurangan impor beras Pakistan terhadap petani beras Indonesia maka adapun kesimpulannya adalah bahwasannya Indonesia sebagai negara berkembang yang jumlah penduduknya banyak harus menghindari ketergantungan yang terlalu besar kepada beras asal impor, karena banyak mengandung risiko seperti keterbatasan devisa, melemahnya nilai rupiah terhadap dolar, ketidakstabilan harga beras di pasar dunia dan sebagainya, sehingga dapat membuat rapuhnya ketahanan pangan nasional.

Pemberian izin impor kepada swasta (importir umum) agar dikaji ulang. Sebaiknya beras diproteksi saja sehingga dalam impor beras ini hanya pemerintah saja yang boleh mengimpor beras dan didistribusikan lewat Bulog. Dengan kata lain dalam persoalan komoditas beras, pemerintah harus melakukan pengendalian agar masyarakat tidak menjadi obyek mencari keuntungan.

Menurunnya produksi beras dengan konsekuensinya mengimpor beras dalam jumlah besar dan berkelanjutan merupakan persoalan yang berpotensi besar terhadap ancaman ketahanan pangan nasional. Kegagalan dalam persediaan beras sebagai bahan pangan strategis akan bisa menimbulkan implikasi sosial dan politik yang bernilai sangat mahal, seperti yang telah terjadi pada tahun 1998.

Dengan sumber daya alam, kekayaan biodiversiti lokal dan potensi kekuatan kelembagaan perekonomian masyarakat pedesaan tidak sepatutnya jika bangsa Indonesia menggantungkan kebutuhan berasnya pada pasar luar negeri (impor) secara berkelanjutan. Terlebih lagi jika disadari bahwa sistem produksi beras nasional hingga kini masih menjadi bagian integral dari perekonomian masyarakat pedesaan.

Akhir-akhir ini di kalangan perumus kebijakan pembangunan (ekonomi) berkembang pemikiran tentang liberalisasi

perdagangan komoditas, termasuk di dalamnya komoditas beras. Ditinjau dari semangat untuk membangun perekonomian dengan kekuatan sendiri, terutama untuk mencukupi kebutuhan beras sendiri, hal ini tidak sejalan dengan catatan historis keberadaan dan kelangsungan masyarakat Indonesia karena beras bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata sebagai komoditas bernilai ekonomi tapi juga sekaligus mengandung nilai sosial, psikologis, dan politik.

Upaya untuk meningkatkan produksi beras dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan indeks pertanaman menjadi tiga kali, memberikan insentif kepada petani seperti antara lain menaikkan harga dasar gabah dan menurunkan harga saptoran (benih, pupuk dan pestisida), mengendalikan serangan hama/penyakit dan memperbaiki manajemen pasca panen sehingga kehilangan hasil gabah dapat ditekan dan penurunan rendemen beras dapat diperkecil.

#### IV. Referensi

##### Jurnal:

BALIPTA (Balai Penelitian Padi), *Inovasi teknologi untuk Peningkatan Produksi*

*Padi dan Kesejahteraan Petani*, Sukamandi: Badan Litbang Pertanian

Dokumen Indikator Perekonomian, BPS & laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, 2012

Gatoet S. Hardono. *Liberalisasi Perdagangan*. Pusat Pengembangan dan Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian

Henry Bernstein. 2014. *Tantangan Kedaulatan Pangan*. ARC Books

- Kebijakan pangan dan ketahanan pangan nasional. Palembang. UNSRI. Pers Liberalisasi Perdagangan.*
- Gatoet S. Hardono. Pusat Pengembangan dan Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian
- Mearss, Leon. "Kebijakan Pangan" dalam Anne Both. 1990. *Ekonomi orde baru*. Jakarta. LP3ES
- Muhammad Zainul Abidin. *DAMPAK KEBIJAKAN IMPOR BERAS DAN KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL. Socio Informa Vol. 1, No. 03, September - Desember, Tahun 2015*
- Pranolo, Tito. 2001. "Pangan, Ketahanan Pangan dan Liberalisasi Perdagangan", *Bunga Rampai Ekonomi Beras*. LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Ramlan. 2002. *Mempersoalkan Beras Impor*. Warta Intra Bulog, Jakarta
- Suryana A. 2008. *Menelisik Ketahanan Pangan, Kebijakan Pangan, dan Swasembada Beras* Jurnal Agro Ekonomi. JAE Vol. 1(1). Bogor : Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
- Tri Andrianto, *Pengaruh Letter of Intent (LOI) IMF terhadap Pelemahan Ketahanan Pangan Indonesia, 1995-2009*
- Wahono, Francis. 1994. "Dinamika Ekonomi Desa sesudah 25 tahun Revolusi Hijau." Dalam Prisma, edisi 3 maret 1994. Jakarta. 1994
- AAK. 1990 *Budidaya Tanaman Padi*. Yogyakarta : Kanisius
- Ajija, R. Shochrul., Dyah W. Sari, Rahmat H. Setianto, dan Martha R. Primanti. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amang, Beddu dan M.H. Sawit. 2001. *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional*. Pelajaran Dari Orde Baru dan Orde Reformasi. Penerbit IPB Press, Bogor. Edisi Kedua.
- Arifin, Bustanul. 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia: Telaah Struktur, Kasus, dan Alternatif Strategi*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Cahyono, S Andy. 2001. *Analisis Penawaran dan Permintaan Beras di Propinsi Lampung dan Kaitannya dengan Pasar Beras Domestik dan Internasional*. Tidak dipublikasikan. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Krugman, Paul R, dan Maurice, Ostefeld. 1999. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Krugman, Paul R dan Maurice Obstfeld. 2003. *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 2. lihat pada Sumarlan, 2016, *Upaya Jaringan NGO International Pops Elimination Network (IPEN) Mengatasi Masalah Penggunaan Merkuri Di Indonesia*, Skripsi Strata-1, Universitas Riau: Pekanbaru
- M. L. Jhingan. 1990. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*.

**Buku:**

- Terjemahan. Jakarta. Rajawali Press (1983)
- Mochtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, 1990 Sawit, Husein. 2010. *Kebijakan harga Beras di 5 Negara Asia*. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Rakyat. Bogor: Kingjendom Studio
- Sugiharso, Safuan. 1997. *Ketahanan Pangan dan Gejolak Moneter Dalam Penduduk, Pangan dan Ancaman Hantu Malthus*. Warta Demografi No. 3/1997. Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- Tambunan, Tulus *et al.* 2003. *Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Skripsi :**
- ANALISIS PENCAPAIAN PROGRAM SWASEMBADA BERAS PADA TAHUN 2017 DI INDONESIA. Rahayu. 2016. Institut Pertanian Bogor.
- Kusumaningrum R, 2008. *Dampak Kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah Terhadap Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia*. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana. Bogor. IPB
- Lubis, A. 2005. *Analisis Kebijakan Impor Beras dan Kaitannya dengan Diversifikasi Pangan Pokok*. Tesis. Bogor. Sekolah Pasca Sarjana IPB
- Dokumen:**
- Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014
- KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA INTI PERMASALAHAN DAN ALTERNATIF SOLUSINYA. Tulus Tambunan . Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti . Kadin Indonesia
- Permendag Nomor 12/M-DAG/04/2008
- Permendag Nomor 54/M-DAG/per/10/2009
- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 **DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN PERTANIAN**
- Surat Kabar:**
- Bustanul Arifin. 2004. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta. Kompas.
- Internet:**
- FAO. 2012. Fluktuatif Komoditi Impor di Indonesia. <http://faostat.fao.org/>, Diakses Tanggal 15 Juni 2017, pkl. 16.58 WIB.
- USDA. 2014. World Agricultural Production. <http://www.usda.gov/p/portal/usda/usdahome>, Diakses 15 Juni 2017, pkl. 16.59 WIB
- <http://pangan.agroprima.com>, diakses 30 November 2017, pkl. 08.31 WIB
- <http://kamusbisnis.com/arti/letter-of-intent/>, diakses 30 November 2017, pkl.16.00 WIB
- “Sejarah Bulog, Sebelum Menjadi Perum”, dalam [http://bulog.co.id/old\\_website/sejara](http://bulog.co.id/old_website/sejara)

- [h.php](#)., diakses 30 November 2017, pkl. 16.14 WIB
- <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/18/20543911/Tahun.2016.Indonesia.Buka.Peluang.Impor.Beras.dari.Pakistan>, diakses 1 Desember 2017, pkl. 18.23 WIB
- “Krisis Pangan Dan Solidaritas”, dalam <http://zainurihanif.com/2008/06/21krisispangan-dan-solidaritas/#more-236>., diakses 30 November 2017, pkl. 16.18 WIB
- 7 Oktober Waktu Krusial Impor Beras”, dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/06/16273988/7.Oktober.Waktu.Krusial.Impor.Beras>., diakses 30 November 2017, pkl. 16.23 WIB
- “Indonesia Impor 1,57 Juta Ton Beras”, dalam <http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/09/06/135472/Indonesia-Impor-1-57-Juta-Ton-Beras>., diakses 30 November 2017, pkl. 16.24 WIB
- [https://www.kompasiana.com/ferrynang/indonesia-negara-penghasil-pangan-yang-masih-impor-bahan-pangan\\_550a1d6e8133117f1cb1e72d](https://www.kompasiana.com/ferrynang/indonesia-negara-penghasil-pangan-yang-masih-impor-bahan-pangan_550a1d6e8133117f1cb1e72d), diakses 5 Desember 2017, pkl. 21.03 WIB
- <http://news.metrotvnews.com/read/2015/05/19/397493/jurus-pamungkas-agar-tidak-impor-beras>, diakses 5 Desember 2017, pkl. 21.20 WIB
- <https://cips-indonesia.org/id/publications/reformasi-kebijakan-beras-menghapuskan-pembatasan-perdagangan-beras-di-indonesia/>, diakses 5 Desember 2017, pkl. 21.25 WIB
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20140809160536-92-1344/ini-rincian-impor-beras-di-indonesia-2013-2014/>, diakses 27 November 2017, pkl. 08.38 WIB
- <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-501839/data-impor-beras-diputuskan-dkp>, diakses 27 November 2017, pkl. 08.38 WIB
- <https://finance.detik.com/.../ini-alasan-ri-ingin-impor-beras-dari-india-dan-pakistan>, diakses 25 November 2017, pkl. 18.35 WIB